



# LAPORAN KINERJA TAHUNAN

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA**

**PROVINSI DKI JAKARTA**

**TAHUN 2020**

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
JL. D.I. PANJAITAN NO.10  
JAKARTA**



YAMUHAJ AHEMDE YAROHAI

AMADA MAZITHIN DE KAYALIW SUTVIAZ

ATRAHAJ DEI IRMIVONF

OSCE MUHAT

AMADA MAZITHIN DE KAYALIW SUTVIAZ  
ARHILAL ATONDER DEI OVAHASTANIRHIVANE

OSCE MUHAT DEI IL

AMADA MAZITHIN DE KAYALIW SUTVIAZ

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Tahunan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 dapat disusun dengan baik sesuai rencana.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Keputusan Menteri Agama Nomor 702 tahun 2016 yang telah di revisi dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 94 tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama.

Laporan Kinerja Tahunan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 disusun secara terukur dan sistem berjenjang dengan metode pengumpulan dan pengolahan data serta Monitoring dan Evaluasi Rencana Kinerja Tahunan dari setiap satuan organisasi sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil dan sebagai penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Semoga Laporan Kinerja Tahunan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020, selain sebagai media pertanggungjawaban atas mandat yang diemban dan target kinerja yang telah ditetapkan, juga dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan umpan balik bagi upaya perbaikan kinerja pada masa yang akan datang dalam rangka mensukseskan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden.

Jakarta, 4 Februari 2021

Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Agama Prov. DKI Jakarta



H. Saiful Mujab, MA  
06808201995031002

## DAFTAR ISI

|  | Hal |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR .....   | i   |
| DAFTAR ISI .....   | iii |
| IKHTISAR EKSEKUTIF .....   | iv  |
| <br>   |     |
| BAB I PENDAHULUAN .....  | 1   |
| A. Latar Belakang .....  | 1   |
| B. Aspek Strategis .....   | 2   |
| C. Permasalahan Utama .....  | 3   |
| D. Sistematika Penyajian .....   | 4   |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA .....   | 6   |
| A. Langkah Strategis .....   | 7   |
| B. Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI<br>Jakarta .....  | 9   |
| C. Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI<br>Jakarta ..... | 34  |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....  | 35  |
| A. Capaian Kinerja Organisasi .....  | 35  |
| B. Analisis Capaian Kinerja .....  | 35  |
| C. Realisasi Anggaran .....  | 47  |
| BAB IV PENUTUP .....   | 51  |

LAMPIRAN

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Kementerian Agama merupakan kementerian yang mengemban tugas dan fungsi pembangunan bidang agama serta bidang pendidikan. Hal tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Agama dan telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dicapai Kementerian Agama dalam masa waktu lima tahun ke depan.

Laporan Kinerja Tahunan merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas dalam rangka menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden.

Kementerian Agama telah menetapkan 13 sasaran strategis dalam rangka mencapai 6 tujuan Kementerian Agama yang dituangkan dalam 11 sasaran strategis, 16 sasaran program dan 5 tujuan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Dan dalam rangka mencapai 5 tujuan tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta menetapkan 52 Sasaran Kegiatan (SK) yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024.

Dalam menetapkan tujuan dan sasaran, Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Khusus Ibukota Jakarta mendukung Visi dan Misi Kementerian Agama. Adapun visi Kementerian Agama tahun 2020-2024 ***“Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”***. Visi ini dijabarkan dalam lima misi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yaitu :

1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial;
2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas; dan
5. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

Dari lima misi di atas kemudian dijabarkan menjadi sebelas sasaran strategis sebagaimana tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, yaitu :

1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial, dengan sasaran strategis berikut :
  - a. Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama.

2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, dengan sasaran strategis berikut :
  - a. Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama; dan
  - b. Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya.
3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan, dengan sasaran strategis berikut :
  - a. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan
  - b. Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat.
4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas, dengan sasaran strategis berikut :
  - a. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran;
  - b. Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan;
  - c. Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik;
  - d. Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan; dan
  - e. Meningkatnya kualitas mental/karakter siswa.
5. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif, dengan sasaran strategis berikut :
  - a. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel; dan
  - b. Meningkatnya kualitas penelitian pengembangan dan kebijakan.

Secara keseluruhan capaian sasaran strategis Kementerian Agama sudah baik dan memuaskan, maka hasil yang diperoleh perlu dipertahankan dan ditingkatkan guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi. Dan semoga Laporan Kinerja Tahunan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020, selain sebagai media pertanggungjawaban atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan, juga dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja serta memberi umpan balik bagi upaya perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

Jakarta, 4 Februari 2021

Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Agama Prov. DKI Jakarta



Mujab, MA  
96808201995031002

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan bidang pendidikan, Kementerian Agama mempertimbangkan hasil capaian kinerja 5 tahun terakhir, potensi dan permasalahan yang dihadapi, serta Visi Presiden dan Wakil Presiden dalam menetapkan Visinya. Visi Kementerian Agama ditetapkan dengan merujuk pada Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 yaitu *"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"*. Dan Visi Kementerian Agama dalam rangka mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 yaitu untuk mewujudkan *"Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong"*.

Yang dimaksud "untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong" adalah bahwa masyarakat yang mempunyai ciri-ciri di atas akan memberikan kontribusi terhadap terwujudnya visi Presiden dan Wakil Presiden dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Dalam jangka panjang, capaian Visi ini akan memberikan kontribusi kepada Visi Pendidikan Indonesia 2025 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 "Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna)".

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Agama tahun 2020-2024, Kementerian Agama berperan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang agama dan bidang pendidikan di seluruh jenjang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam bidang agama, Kementerian Agama merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan dalam urusan agama. Dalam meningkatkan layanan keagamaan yang adil dan merata, Kementerian Agama akan terus memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama

untuk mencapai visi masyarakat yang saleh. Peningkatan kualitas kesalehan umat beragama yang diperkuat dengan moderasi beragama baik melalui bimbingan masyarakat maupun pendidikan agama pada satuan pendidikan, akan menghasilkan masyarakat yang saleh di depan khalik-Nya, tetapi juga bersikap moderat dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam bidang pendidikan, Kementerian Agama terus melaksanakan layanan pendidikan yang merata dan bermutu pada pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan yang ditujukan untuk menghasilkan peserta didik yang cerdas yang akhirnya memberikan kontribusi dalam menciptakan masyarakat yang cerdas. Peningkatan produktivitas dan daya saing pendidikan akan menghasilkan lulusan yang produktif dan efisien sehingga setelah terjun ke masyarakat akan memberikan kontribusi dalam menciptakan masyarakat yang unggul, yaitu memiliki keunggulan komparatif. Di samping itu, tata kelola pemerintahan yang baik sangat diperlukan untuk menciptakan kondisi bagi pembiasaan ASN yang profesional dan andal, sebagai lokomotif penggerak dan sekaligus pelaksana dari semua misi yang dicanangkan.

### **Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama yang telah direvisi dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019, maka kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

#### **1. Kedudukan**

Kementerian Agama berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh Menteri Agama. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta berkedudukan di provinsi dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.

#### **2. Tugas Pokok**

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. DKI Jakarta menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di provinsi;
- b. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang haji dan umrah;
- c. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan;
- d. Pembinaan kerukunan umat beragama;
- e. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
- f. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program; dan
- g. pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di provinsi.

#### B. Aspek Strategis

Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa tugas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta adalah melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam Wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta wajib mendukung program – program prioritas yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam rangka menyukseskan program prioritas yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan visi: **“Terwujudnya Masyarakat Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin dalam Rangka Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kantor Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan misi, yaitu:

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama;
3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas;
4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;
5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel;
6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum dan pendidikan keagamaan; dan
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya.

Sesuai tugas dan fungsinya, Kementerian Agama memiliki dua tujuan, yaitu tujuan pembangunan **bidang agama**, dan tujuan pembangunan **bidang pendidikan**, dengan sasaran masing – masing tujuan adalah sebagai berikut :

1. Tujuan pembangunan bidang agama. Dalam menjalankan tugas tersebut terdapat 6 (enam) sasaran strategis yang menjadi prioritas dalam pembangunan bidang agama, yaitu:
  - a. peningkatan kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitasi keagamaan;
  - b. peningkatan harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama;
  - c. peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama;
  - d. peningkatan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;
  - e. peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan dan akuntabel; dan
  - f. terselenggaranya tata kelola pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
2. Tujuan pembangunan bidang pendidikan. Dalam menjalankan tugas tersebut terdapat 7 (tujuh) sasaran strategis yang menjadi prioritas dalam pembangunan bidang pendidikan, yaitu:
  - a. Peningkatan akses bagi masyarakat tidak mampu terhadap Program Indonesia Pintar pada pendidikan dasar-menengah melalui manfaat Kartu Indonesia Pintar;
  - b. Peningkatan angka partisipasi pendidikan dasar, menengah dan tinggi;

- c. Pengurangan jumlah siswa yang tidak melanjutkan pendidikan;
- d. Peningkatan jaminan kualitas pelayanan pendidikan;
- e. Peningkatan proporsi pendidik yang kompeten dan profesional pada pendidikan umum berciri khas agama;
- f. Peningkatan proporsi guru agama yang profesional; dan
- g. Peningkatan akses pendidikan keagamaan sesuai aspirasi umat beragama.

Dari masing-masing sasaran strategis tersebut diatas, terdapat beberapa aspek strategis yang dapat dilakukan dan dikembangkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta serta menjadi daya pendukung bagi tercapainya tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, antara lain:

#### 1. Kehidupan Beragama

Yaitu peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan keagamaan, peningkatan kualitas pelayanan keagamaan, optimalisasi pengelolaan dan adan aset sosial keagamaan dan pemberdayaan lembaga sosial keagamaan.

#### 2. Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan umat beragama merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan. Oleh sebab itu salah satu aspek yang menjadi fokus prioritas adalah mewujudkan dan meningkatkan kerukunan umat beragama.

#### 3. Pendidikan RA, Madrasah, Pendidikan Agama dan Keagamaan

Pendidikan RA, Madrasah, Pendidikan Agama dan Keagamaan merupakan pilar penting pembangunan pendidikan nasional, dalam rangka menghasilkan SDM yang berkualitas dan berakhlak mulia.

#### 4. Penyelenggaraan Haji

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan salah satu program prioritas pembangunan bidang agama dan seringkali diposisikan sebagai salah satu indikator kunci kinerja Kementerian Agama.

#### 5. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa

Yaitu peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dengan memfokuskan pada 5 aspek, yaitu: (1) penataan organisasi; (2) peningkatan kualitas SDM; (3) peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan BMN; (4) peningkatan program pengawasan dan

akuntabilitas kinerja; dan (5) optimalisasi perencanaan program, pengelolaan anggaran, monitoring dan evaluasi kegiatan.

### **C. Permasalahan Utama**

Memperhatikan pelaksanaan program dan tugas dengan kondisi yang obyektif, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Permasalahan-permasalahan ini yang menghambat pelaksanaan program dan tugas sehingga berdampak pada kurang optimalnya hasil yang dicapai. Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya:

1. Masih terbukanya ruang bagi kemunculan berbagai paham keagamaan, baik yang bersifat lokal maupun trans nasional;
2. Jumlah tenaga penyedia pelayanan keagamaan, jika dilihat dari distribusi dan rasio kecukupan tenaga dibanding yang dibutuhkan, masih jauh dari memadai;
3. Sebaran madrasah masih terkonsentrasi pada ibu kota kecamatan / kabupaten / kota / provinsi, sehingga layanan pendidikan madrasah belum dapat menjangkau secara seluruhnya;
4. Rasio jumlah siswa-pendidik yang masih terlalu rendah menimbulkan persoalan dalam hal efisiensi pembiayaan pendidikan;
5. Masih terbatasnya ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas baik dari segi jumlah maupun penempatannya;
6. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas;
7. Masih bertahannya pola pikir lama pada sebagian aparatur sehingga tingkat penerimaan terhadap proses reformasi birokrasi belum menyeluruh.

### **D. Sistematika Penyajian**

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Agama Nomor 702 Tahun 2016 yang telah di revisi dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama. Secara umum, Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI

Jakarta Tahun 2020 ini menginformasikan capaian kinerja yang telah dicapai selama Tahun 2020, dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I – Pendahuluan**, yang berisi latar belakang, maksud dan tujuan, kedudukan, tugas dan fungsi, program strategis, permasalahan utama dan sistematika penyajian.

**BAB II – Perencanaan Kinerja**, yang berisi Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020.

**BAB III – Akuntabilitas Kinerja**, yang berisi hasil capaian kinerja dan realisasi anggaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020.

**BAB IV – Penutup**, yang berisi kesimpulan atas capaian kinerja organisasi serta langkah pada masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

**Lampiran.**

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Langkah Strategis

Perencanaan adalah sebuah proses memformulasikan, mengimplementasikan dan mengevaluasi keputusan yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya. Dalam penyusunan perencanaan, dihasilkan sebuah komitmen yang akan dijadikan tolak ukur dalam melaksanakan sebuah pekerjaan.

Perencanaan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 diawali dengan penyusunan dokumen penetapan kinerja yang merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Sedangkan untuk menunjang pelaksanaan kinerja secara optimal, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta telah melakukan berbagai kebijakan strategis dan penyesuaian arah kebijakan yang didasarkan pada arah kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia, diantaranya:

1. Penetapan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2020;
2. Penetapan Perjanjian Kinerja tahun 2020;
3. Pelaksanaan evaluasi program secara berkala, melalui rapat evaluasi secara berkala (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan);
4. Penganjuran dan penerapan 5 (lima) nilai budaya kerja, yaitu integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan. Kelima nilai budaya kerja tersebut menjadi spirit pegawai dan institusi untuk mewujudkan Kementerian Agama yang bersih dan melayani.

### B. Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta

Pada Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019, program-program yang dijalankan bertujuan untuk mendukung visi “Terwujudnya Masyarakat Jakarta yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin dalam Rangka Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.” Berdasarkan visi tersebut, maka terlihat

bahwa pada periode Rencana Strategis Tahun 2015-2019, visi pembangunannya terbagi atas empat komponen, yaitu: taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera.

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta telah menyusun 7 (tujuh) misi sebagai pendukung, yaitu:

1. meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
2. memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama;
3. menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas;
4. meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;
5. mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel;
6. meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan; dan
7. mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.

Visi dan misi tersebut kemudian dijabarkan dalam 8 (delapan) tujuan sesuai dengan masing-masing sasaran. Berikut indikator realisasi dan pengukuran capaiannya, yaitu:

1. peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
2. penguatan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis;
3. pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan merata;
4. peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;
5. peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;
6. peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama;
7. peningkatan akses pendidikan umum berciri khas agama dan pendidikan keagamaan; dan
8. peningkatan mutu pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan.

Dalam upaya penyelarasan dan mempertajam tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten, berdasarkan kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, kemudian disederhanakan ke dalam 5 (lima) sasaran, sasaran tersebut adalah:

1. meningkatnya kualitas kehidupan umat beragama;

2. meningkatnya harmoni sosial dan kerukunanantar umat beragama;
3. meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan;
4. meningkatnya akses layanan pendidikan; dan
5. meningkatnya mutu pendidikan agama dan keagamaan.

### C. Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020

Adapun capaian dan sasaran selama kurun waktu 2020 - 2024 berdasarkan indikatornya masing-masing disajikan dalam uraian berikut:

Tabel 1  
Perjanjian Kinerja  
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta  
Tahun 2020

| No. | Sasaran Kegiatan   | IKSK  | TARGET                |
|-----|--|---|-----------------------|
| 1.  | Meningkatnya kualitas penyuluhan agama   | a. Nilai kinerja penyuluh agama   | 85.83 Nilai           |
|     |  | b. Persentase penyuluh agama yang dibina  | 77.48 %               |
|     |  | c. Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi  | 1,885 Orang           |
|     |  | d. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan   | 32,826 Kelompok       |
| 2.  | Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama   | a. Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti  | 100 %                 |
|     |  | b. Jumlah aktor kerukunan yang dibina   | 8,863 Orang           |
|     |  | c. Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina  | 72 Lokasi             |
| 3.  | Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa | a. Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi                             | 191 Lembaga           |
|     |  | b. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan   | 82 Kegiatan           |
| 4.  | Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)  | Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP   | 96 %                  |
| 5.  | Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama  | a. Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama | 29.17 %               |
|     |  | b. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan   | 193 Lokasi / Kegiatan |
| 6.  | Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama   | Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat   | 94.17 %               |

|    |  |   |       |          |
|----|--|---|-------|----------|
| 7. | Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran | a. Persentase rumah ibadah yang ramah   | 40.73 | %        |
|    |  | b. Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina  | 14.50 | %        |
|    |  | c. Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya   | 70    | Orang    |
| 8. | Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik                        | Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media masa dan ruang publik                                | 92    | Lokasi   |
| 9. | Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama               | a. Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama             | 50    | %        |
|    |  | b. Persentase siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama    | 52.5  | %        |
|    |  | c. Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama         | 35.33 | %        |
|    |  | d. Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama  | 14.50 | %        |
|    |  | e. Persentase guru pendidikan agama di sekolah keagamaan dan sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama | 55.33 | %        |
|    |  | f. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama                                   | 70.67 | %        |
|    |  | g. Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama                       | 9.28  | %        |
|    |  | h. Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama                               | 27.5  | %        |
|    |  | i. Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama                   | 31.25 | %        |
|    |  | j. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di Madrasah yang bermuatan moderasi beragama                     | 140   | Kegiatan |
|    |  | k. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama            | 51    | Kegiatan |

|     |  |   |        |           |
|-----|--|---|--------|-----------|
| 10  | Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam                  | a. Persentase pesantren yang berwawasan moderat   | 80     | %         |
| 11  | Menguatnya dialog lintas agama dan budaya  | Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan  | 707    | Kegiatan  |
| 12. | Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat   | Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak) | 11     | Unit      |
| 13  | Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama  | Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh Pesparawi MTQ, STQ, Ustawa dll)                     | 44     | Kegiatan  |
| 14  | Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama  | a. Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi rumah ibadah yang dibina           | 19     | Kegiatan  |
|     |  | b. Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina   | 56     | Orang     |
| 15  | Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan   | a. Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan  | 1256   | Unit      |
|     |  | b. Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan   | 57,090 | Eksemplar |
|     |  | c. Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi   | 20.6   | %         |
|     |  | d. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan   | 58     | Kegiatan  |
|     |  | e. Jumlah masjid/ musala yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat  | 5      | Lokasi    |
|     |  | f. Jumlah SDM Ahli Falakiyah yang dibina  | 20     | Orang     |
| 16. | Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk (Islam)  | a. Jumlah KUA yang direvitalisasi   | 4      | Lokasi    |
|     |  | b. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana  | 10     | Lokasi    |
|     |  | c. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah  | 50     | Orang     |
|     |  | d. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah                            | 50     | Orang     |
| 17  | Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga   | Jumlah keluarga yang menerima bimbingan dan layanan pusaka sakinah/ Kristiani/ Bahagia/ Sukinah/ Hitta sukhaya          | 4,715  | Pasang    |
| 18  | Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus | Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi  | 50     | %         |
| 19  | Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji  | a. Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan  | 11.16  | %         |
|     |  | b. Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan                                       | 0.5    | %         |

|    |   |  |       |          |
|----|---|--|-------|----------|
| 20 | Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji                          | Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu   | 85    | %        |
| 21 | Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji   | Prosentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji   | 95    | %        |
| 22 | Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu                     | Persentase keberlanjutan layanan ( <i>Continuity service</i> )   | 80    | %        |
| 23 | Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat                      | a. Persentase amil yang dibina   | 1.82  | %        |
|    |   | b. Persentase lembaga zakat yang dibina  | 6.38  | %        |
| 24 | Meningkatnya pengelolaan aset wakaf   | a. Persentase lembaga wakaf yang dibina  | 9.82  | %        |
|    |   | b. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan  | 20    | %        |
|    |   | c. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat   | 6.67  | %        |
| 25 | Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif            | a. Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum                            | 75    | %        |
|    |   | b. Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum         | 10    | %        |
|    |   | c. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum                   | 46.67 | %        |
| 26 | Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan  | a. Persentase guru di madrasah/ sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan    | 47.78 | %        |
|    |   | b. Persentase ustadz di pendidikan diniyah/ muadalah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan | 47.78 | %        |
|    |   | c. Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan                  | 47.78 | %        |
|    |   | d. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/Sekolah Keagamaan                        | 3     | Kegiatan |
|    |   | e. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa   | 100   | Siswa    |
|    |   | f. Persentase siswa yang mengikuti asesmen kompetensi di madrasah/ sekolah keagamaan                           | 55    | %        |
| 27 | Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran | a. Persentase madrasah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran  | 6     | %        |

|    |   |  |         |               |
|----|---|--|---------|---------------|
|    |   | b. Persentase sekolah Keagamaan yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran   | 21.67   | %             |
|    |   | c. Persentase mata pelajaran di Madrasah yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran          | 6       | %             |
|    |   | d. Persentase mata pelajaran di Sekolah Keagamaan yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran | 20.17   | %             |
| 28 | Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Pendidikan   | a. Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana         | 88.00   | %             |
|    |   | b. Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana                                   | 59.75   | %             |
|    |   | c. Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana                           | 61.75   | %             |
|    |   | d. Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana                            | 84.75   | %             |
|    |   | f. Persentase Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana                       | 25      | %             |
| 29 | Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat | a. Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah   | 188,981 | Orang         |
|    |   | b. Jumlah siswa penerima BOS pada Sekolah Keagamaan/PDF Muadalah   | 22,939  | Orang         |
|    |   | c. Persentase siswa penerima PIP pada madrasah/ sekolah keagamaan  | 84      | %             |
|    |   | d. Persentase siswa penerima PIP pada Pendidikan Keagamaan/PDF Muadalah  | 20      | %             |
|    |   | e. Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional  | 4       | %             |
| 30 | Meningkatnya kualitas penanganan ATS  | a. Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi  | 0.10    | %             |
|    |   | b. Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren  | 37      | %             |
| 31 | Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah   | Jumlah siswa RA/ Taman Seminari/Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP        | 1,026   | Orang/Lembaga |
| 32 | Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan  | a. Persentase ustad pendidikan diniyah/muadalah yang lulus sertifikasi   | 87      | %             |

|    |  |  |       |         |
|----|--|--|-------|---------|
|    |  | b. Persentase tenaga kependidikan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi                   | 8     | %       |
|    |  | c. Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi                                | 10    | %       |
|    |  | d. Persentase ustad pendidikan diniyah/ muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG                           | 5     | %       |
|    |  | e. Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi   | 75    | %       |
| 33 | Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal         | a. Persentase guru di sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal                               | 63.33 | %       |
|    |  | b. Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal                             | 67.50 | %       |
|    |  | c. Persentase guru pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal                                   | 10    | %       |
|    |  | d. Persentase tenaga kependidikan pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal                    | 75    | %       |
| 34 | Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik | a. Persentase Guru Madrasah/sekolah keagamaan yang mengikuti PPG   | 6     | %       |
|    |  | b. Persentase guru pendidikan agama yang mengikuti PPG   | 36.80 | %       |
|    |  | c. Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1  | 138   | %       |
|    |  | d. Persentase Calon Pengawas Madrasah/Sekolah Keagamaan yang menerima beasiswa S2                                      | 10    | %       |
| 35 | Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi berdasarkan hasil pemetaan              | Jumlah madrasah/ pendidikan diniyah/ muadalah/sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi | 45    | Lembaga |
| 36 | Meningkatnya budaya mutu Pendidikan  | a. Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu   | 80    | %       |
|    |  | b. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu  | 61.67 | %       |
|    |  | c. Persentase siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional                                    | 80    | %       |
|    |  | d. Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional                           | 7.50  | %       |

|    |   |  |       |          |
|----|---|--|-------|----------|
| 37 | Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/ sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan | a. Persentase MTs/MA/SMPTK/ SMTK/SMAK/ Pesantren/ Pasraman yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran      | 60    | %        |
|    |   | b. Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman             | 10    | %        |
|    |   | c. Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang ramah anak   | 36.25 | %        |
| 38 | Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan            | a. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah/ pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan   | 30    | Kegiatan |
|    |   | b. Jumlah gugus pramuka madrasah/ pendidikan keagamaan yang dibina   | 99    | Unit     |
| 39 | Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum   | a. Persentase produk hukum yang diterbitkan  | 85    | %        |
|    |   | b. Persentase kasus hukum yang terselesaikan   | 50    | %        |
|    |   | c. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan   | 3     | Kegiatan |
| 40 | Meningkatnya kualitas pengelolaan kerjasama luar negeri   | Persentase rekomendasi izin orang asing  | 94    | %        |
| 41 | Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)       | a. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja   | 100   | %        |
|    |   | b. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti | 95    | %        |
|    |   | c. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan  | 10    | %        |
|    |   | d. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)                                     | 10    | %        |
|    |   | e. Persentase ASN yang memenuhi syarat <i>leveling</i> kompetensi jabatannya   | 20    | %        |
|    |   | f. Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu  | 95    | %        |
|    |   | g. Persentase data ASN yang diupdate   | 90    | %        |
|    |   | h. Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses   | 40    | %        |
| 42 | Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan                         | a. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu                                    | 2     | Dokumen  |

|    |  |  |       |          |
|----|--|--|-------|----------|
|    |  | b. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)                                     | 90    | %        |
|    |  | c. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal  | 94    | %        |
|    |  | d. Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama  | 25    | %        |
| 43 | Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel  | a. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya                                       | 41.95 | %        |
|    |  | b. Persentase tanah yang bersertifikat   | 28.52 | %        |
|    |  | c. Persentase nilai Opname Physic (OP)BMN  | 96    | %        |
| 44 | Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi                          | a. Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis | 70    | %        |
|    |  | b. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi  | 20    | %        |
|    |  | c. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti   | 95    | %        |
| 45 | Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi  | a. Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi  | 80    | %        |
| 46 | Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran   | a. Persentase output perencanaan yang berbasis data  | 90    | %        |
|    |  | b. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra  | 90    | %        |
|    |  | c. Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti   | 70    | %        |
| 47 | Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran                     | a. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas  | 93    | %        |
|    |  | b. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti                 | 70    | %        |
| 48 | Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor  | Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar   | 70    | %        |
| 49 | Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa | a. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu  | 90    | %        |
|    |  | b. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik   | 60    | %        |
|    |  | c. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen  | 75    | %        |
|    |  | d. Persentase menurunnya lelang gagal  | 70    | %        |
|    |  | e. Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding   | 60    | %        |
| 50 | Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga                                      | Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan  | 60    | %        |
| 51 | Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi                            | a. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi  | 24    | Kegiatan |

|    |   |  |    |      |
|----|---|--|----|------|
|    |   | b. Persentase pemberitaan negatif tentang Kemenag yang dicounter | 90 | %    |
| 52 | Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi | Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable    | 60 | Unit |

Perjanjian Kinerja Kementerian Agama Tahun 2020 tersebut di implementasikan dalam 9 (sembilan) program, sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal meningkatkan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama, khususnya dalam meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi, pembinaan, serta pemberian dukungan manajemen kepada semua unit organisasi di lingkungan Kementerian Agama mulai dari tingkat pusat sampai daerah. Ada 7 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama, yaitu:

- a. Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN;
- b. Pembinaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN);
- c. Pembinaan Administrasi Umum;
- d. Pembinaan Administrasi Kepegawaian;
- e. Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana; dan
- f. Pembinaan Administrasi Perencanaan; dan
- g. Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan.

2. Program Kerukunan Umat Beragama

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal penguatan dan peningkatan kualitas kerukunan umat beragama. Ada 3 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Pendidikan Islam, yaitu:

- a. Peningkatan Kualitas Layanan Umat Khonghucu;
- b. Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama; dan
- c. Pembinaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu.

### 3. Program Pendidikan Islam

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada Kementerian Agama, khususnya dalam peningkatan akses, mutu, relevansi dan daya saing serta tata kelola pendidikan umat Islam. Ada 6 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Pendidikan Islam, yaitu:

- a. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah;
- b. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah;
- c. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam;
- d. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam;
- e. Peningkatan Akses dan Kualitas Madrasah; dan
- f. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Keagamaan Islam.

### 4. Program Bimbingan Masyarakat Islam

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama, dan penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan masyarakat Islam. Ada 5 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Bimbingan Masyarakat Islam, yaitu:

- a. Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah;
- b. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat Wakaf;
- c. Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam;
- d. Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah; dan
- e. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam.

### 5. Program Bimbingan Masyarakat Kristen

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama, penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, serta peningkatan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan masyarakat Kristen. Ada 4 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Bimbingan Masyarakat Kristen, yaitu:

- a. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen;
- b. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen;

- c. Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen; dan
- d. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen.

6. Program Bimbingan Masyarakat Katolik

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama, penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, serta peningkatan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan masyarakat Katolik. Ada 4 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Bimbingan Masyarakat Katolik, yaitu:

- a. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik;
- b. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik;
- c. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik; dan
- d. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik.

7. Program Bimbingan Masyarakat Hindu

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama, penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, serta peningkatan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan masyarakat Hindu. Ada 3 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Bimbingan Masyarakat Hindu, yaitu:

- a. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu;
- b. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu; dan
- c. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu.

8. Program Bimbingan Masyarakat Buddha

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama, penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, serta peningkatan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan masyarakat Buddha. Ada 4 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Bimbingan Masyarakat Buddha, yaitu:

- a. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha;
- b. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Buddha;

- c. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Buddha; dan
- d. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha.

9. Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, khususnya dalam meningkatkan kepuasan jemaah, pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jemaah, serta didukung system informasi yang memadai, dan tatakelola yang baik dan bersih. Ada 3 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah, yaitu:

- a. Pelayanan Haji Dalam Negeri;
- b. Pembinaan Haji; dan
- c. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penyelenggaraan haji dan umrah.

Untuk mendukung pelaksanaan 9 (sembilan) program tersebut di atas, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 140,237,695,000,- dengan rincian per program adalah sebagai berikut:

Tabel 2  
Pagu Anggaran Per Program  
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta  
Tahun 2020

| No                        | Program   | Anggaran                  |
|---------------------------|---|---------------------------|
| 1                         | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama | Rp 19,809,654,000         |
| 2                         | Kerukunan Umat Beragama   | Rp 339,112,000            |
| 3                         | Bimbingan Masyarakat Islam  | Rp 9,065,095,000          |
| 4                         | Pendidikan Islam  | Rp 83,761,887,000         |
| 5                         | Bimbingan Masyarakat Kristen  | Rp 9,593,262,000          |
| 6                         | Bimbingan Masyarakat Katolik  | Rp 6,140,230,000          |
| 7                         | Bimbingan Masyarakat Hindu  | Rp 1,928,547,000          |
| 8                         | Bimbingan Masyarakat Buddha   | Rp 3,082,793,000          |
| 9                         | Penyelenggaraan Haji dan Umrah  | Rp 6,517,115,000          |
| <b>JUMLAH KESELURUHAN</b> |   | <b>Rp 140,237,695,000</b> |

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

#### Capaian Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Kementerian Agama sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis dan kriteria indikator kinerja yang baik. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 telah menetapkan Perjanjian Kinerja yang berisikan 52 Sasaran Kegiatan dengan berbagai Indikator Kinerja Utama. Pencapaian IKU dari sasaran tersebut dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Agama Tahun 2020. Secara umum capaian IKU Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 disajikan adalah sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Tabel Capaian IKSK**  
**Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta**  
**Tahun 2020**

| NO. | SASARAN KEGIATAN   | IKSK  | TARGET                |         |          |           |          | REALISASI  |   |             |   |              |   |             |        |
|-----|--|---|-----------------------|---------|----------|-----------|----------|------------|---|-------------|---|--------------|---|-------------|--------|
|     |  |   | 1 Tahun               | TW. I % | TW. II % | TW. III % | TW. IV % | Triwulan I |   | Triwulan II |   | Triwulan III |   | Triwulan IV |        |
|     |  |   |                       | Jumlah  | %        | Jumlah    | %        | Jumlah     | % | Jumlah      | % |              |   |             |        |
| 1.  | Meningkatnya kualitas penyuluhan agama   | a. Nilai kinerja penyuluh agama   | 85,83 Nilai           | 25      | 50       | 75        | 100      |            |   |             |   |              |   |             |        |
|     |  | b. Persentase penyuluh agama yang dibina  | 77,48 %               | 25      | 50       | 75        | 100      |            |   |             |   |              |   |             |        |
|     |  | c. Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi  | 1.885 Orang           | 25      | 50       | 75        | 100      |            |   |             |   |              |   |             |        |
|     |  | d. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan   | 32.826 Kelompok       | 25      | 50       | 75        | 100      |            |   |             |   |              |   |             |        |
| 2.  | Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama   | a. Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti  | 100 %                 | 25      | 50       | 75        | 100      |            |   |             |   |              |   |             |        |
|     |  | b. Jumlah aktor kerukunan yang dibina   | 8.863 Orang           | 25      | 50       | 75        | 100      |            |   |             |   |              |   |             |        |
|     |  | c. Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina  | 72 Lokasi             | 25      | 50       | 75        | 100      |            |   |             |   |              |   |             |        |
| 3.  | Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa | a. Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi                           | 191 Lembaga           | 25      | 50       | 75        | 100      |            |   |             |   |              |   |             |        |
|     |  | b. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan   | 82 Kegiatan           | 25      | 50       | 75        | 100      |            |   |             |   |              |   |             |        |
| 4.  | Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)  | Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP   | 96 %                  | 25      | 50       | 75        | 100      | 0          | 0 | 0           | 0 | 0            | 0 | 308,241,000 | 99.87% |
| 5.  | Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama  | a. Persentase lembaga agama organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra uma beragama | 29,17 %               | 25      | 50       | 75        | 100      |            |   |             |   |              |   |             |        |
|     |  | b. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan   | 193 Lokasi / Kegiatan | 25      | 50       | 75        | 100      |            |   |             |   |              |   |             |        |
| 6.  | Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama   | Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat   | 94,17 %               | 25      | 50       | 75        | 100      |            |   |             |   |              |   |             |        |
| 7.  | Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran   | a. Persentase rumah ibadah yang ramah   | 40,73 %               | 25      | 50       | 75        | 100      |            |   |             |   |              |   |             |        |
|     |  | b. Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina  | 14,50%                | 25      | 50       | 75        | 100      |            |   |             |   |              |   |             |        |

|    |  |   |              |    |    |    |     |   |   |   |   |   |   |               |        |  |  |
|----|--|---|--------------|----|----|----|-----|---|---|---|---|---|---|---------------|--------|--|--|
|    |  | c. Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya   | 70 Orang     | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |               |        |  |  |
| 8. | Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik          | Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media masa dan ruang publik                                | 92 Lokasi    | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |               |        |  |  |
| 9. | Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama | a. Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama             | 50 %         | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |               |        |  |  |
|    |  | b. Persentase siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama    | 52,5 %       | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |               |        |  |  |
|    |  | c. Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama         | 35,33 %      | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |               |        |  |  |
|    |  | d. Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama  | 14,50%       | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |               |        |  |  |
|    |  | e. Persentase guru pendidikan agama di sekolah keagamaan dan sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama | 55,33 %      | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |               |        |  |  |
|    |  | f. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama                                   | 70,67%       | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |               |        |  |  |
|    |  | g. Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama                       | 9,28%        | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |               |        |  |  |
|    |  | h. Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama                               | 27,5%        | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |               |        |  |  |
|    |  | i. Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama                   | 31,25%       | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |               |        |  |  |
|    |  | j. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di Madrasah yang bermuatan moderasi beragama                     | 140 Kegiatan | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |               |        |  |  |
|    |  | k. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama            | 51 Kegiatan  | 25 | 50 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,549,332,252 | 92.59% |  |  |

|     |   |  |                  |    |    |    |     |   |   |   |   |   |   |               |        |  |
|-----|---|--|------------------|----|----|----|-----|---|---|---|---|---|---|---------------|--------|--|
| 10. | Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam                 | a. Persentase pesantren yang berwawasan moderat  | 80 %             | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |               |        |  |
|     |   | b. Persentase peningkatan peserta didik pada pendidikan diniyah takmiliah dan pendidikan Al-Qur'an yang berwawasan moderat | 3 %              | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |               |        |  |
| 11. | Menguatnya dialog lintas agama dan budaya   | Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan   | 707 Kegiatan     | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |               |        |  |
| 12. | Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat  | Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)    | 11 Unit          | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |               |        |  |
| 13. | Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama | Jumlah kegiatan eKspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh Pesparawi MTQ, STQ, Ustawa dll)                        | 44 Kegiatan      | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |               |        |  |
| 14. | Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama   | a. Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi rumah ibadah yang dibina              | 19 Kegiatan      | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |               |        |  |
|     |   | b. Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina  | 56 Orang         | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |               |        |  |
| 15. | Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan  | a. Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan   | 1.256 Unit       | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |               |        |  |
|     |   | b. Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan  | 57.090 Eksemplar | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |               |        |  |
|     |   | c. Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi  | 20,6 %           | 25 | 50 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,203,004,425 | 97.64% |  |
|     |   | d. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan  | 58 Kegiatan      | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |               |        |  |
|     |   | e. Jumlah masjid / mushola yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat   | 5 Lokasi         | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |               |        |  |
|     |   | f. Jumlah SDM Ahli Falakiah yang dibina  | 20 Orang         | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |               |        |  |
| 16. | Meningkatnya kualitas pelayanan nikah / rujuk (Islam)   | a. Jumlah KUA yang direvitalisasi  | 4 Lokasi         | 25 | 50 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,288,195,700 | 96.48% |  |
|     |   | b. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana   | 10 Lokasi        | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |               |        |  |

|     |  |  |              |    |    |    |     |   |   |   |   |   |   |               |        |  |  |
|-----|--|--|--------------|----|----|----|-----|---|---|---|---|---|---|---------------|--------|--|--|
|     |  | c. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah   | 50 Orang     | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |               |        |  |  |
|     |  | d. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah   | 50 Orang     | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |               |        |  |  |
| 17. | Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga   | Jumlah keluarga yang menerima bimbingan dan layanan pusaka sakinah/ Kristiani/ Bahagia/ Sukinah/ Hitta sukhaya<br><br>bimbingan dan layanan pusaka sakinah/ Kristiani/ Bahagia/ Sukinah/ Hitta sukhaya | 4.715 Pasang | 25 | 50 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,188,869,935 | 94.63% |  |  |
| 18. | Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus | Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi   | 50 %         | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |               |        |  |  |
| 19. | Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji  | a. Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan   | 11,16%       | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |               |        |  |  |
|     |  | b. Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan  | 0,5 %        | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |               |        |  |  |
| 20. | Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji   | Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu   | 85 %         | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |               |        |  |  |
| 21. | Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji  | Prosentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji   | 95 %         | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |               |        |  |  |
| 22. | Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu  | Persentase keberlanjutan layanan (Continuity service)  | 80 %         | 25 | 50 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,314,944,736 | 76.88% |  |  |
| 23. | Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat   | a. Persentase amil yang dibina   | 1,82 %       | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |               |        |  |  |
|     |  | b. Persentase lembaga Zakat yang dibina  | 6,38%        | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |               |        |  |  |
| 24. | Meningkatnya pengelolaan aset wakaf  | a. Persentase lembaga wakaf yang dibina  | 9,82 %       | 25 | 50 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,730,592,500 | 99.18% |  |  |
|     |  | b. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan  | 20 %         | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |               |        |  |  |
|     |  | c. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat   | 6,67%        | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |               |        |  |  |
| 25. | Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran  | a. Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum  | 75 %         | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |               |        |  |  |

|     |   |  |            |    |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|---|--|------------|----|----|----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     | inovatif  | b. Persentase pendidikan diniyah / muadalah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum           | 10 %       | 25 | 50 | 75 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   | c. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum                       | 46,67 %    | 25 | 50 | 75 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan  | a. Persentase guru di madrasah/ sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan        | 47,78 %    | 25 | 50 | 75 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   | b. Persentase ustadz di pendidikan diniyah/ muadalah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan     | 47,78 %    | 25 | 50 | 75 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   | c. Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan                      | 47,78 %    | 25 | 50 | 75 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   | d. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah / sekolah Keagamaan                          | 3 Kegiatan | 25 | 50 | 75 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   | e. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa   | 100 Siswa  | 25 | 50 | 75 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   | f. Persentase siswa yang mengikuti asesmen kompetensi di madrasah/ sekolah keagamaan                               | 55 %       | 25 | 50 | 75 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran | a. Persentase madrasah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran  | 6 %        | 25 | 50 | 75 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   | b. Persentase sekolah Keagamaan yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran   | 21,67 %    | 25 | 50 | 75 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   | c. Persentase mata pelajaran di Madrasah yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran          | 6 %        | 25 | 50 | 75 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   | d. Persentase mata pelajaran di Sekolah Keagamaan yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran | 20,17 %    | 25 | 50 | 75 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|     |   |  |                       |    |    |    |     |   |   |   |   |   |   |               |        |  |  |  |
|-----|---|--|-----------------------|----|----|----|-----|---|---|---|---|---|---|---------------|--------|--|--|--|
| 28. | Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Pendidikan   | a. Persentase RA / Pratama Widya Pasraman / Taman Seminari / Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana   | 88,00 %               | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |               |        |  |  |  |
|     |   | b. Persentase MI / Ula / SDTK / Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana                             | 59,75 %               | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |               |        |  |  |  |
|     |   | c. Persentase MTs / Wustha / SMPTK / Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana                     | 61,75 %               | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |               |        |  |  |  |
|     |   | d. Persentase MA / Ulya / SMTK / SMAK / Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana                    | 84,75 %               | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |               |        |  |  |  |
|     |   | e. Persentase Sekolah Minggu Buddha / Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana                     | 25 %                  | 25 | 50 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,955,804,650 | 99.54% |  |  |  |
| 29. | Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat | a. Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah   | 188.981 Orang         | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |               |        |  |  |  |
|     |   | b. Jumlah siswa penerima BOS pada Sekolah Keagamaan / PDF Muadalah   | 22,939 Orang          | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |               |        |  |  |  |
|     |   | c. Persentase siswa penerima PIP pada madrasah / sekolah keagamaan   | 84 %                  | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |               |        |  |  |  |
|     |   | d. Persentase siswa penerima PIP pada Pendidikan Keagamaan / PDF Muadalah  | 20 %                  | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |               |        |  |  |  |
|     |   | e. Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional  | 4 %                   | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |               |        |  |  |  |
| 30. | Meningkatnya kualitas penanganan ATS  | a. Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi  | 0,10 %                | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |               |        |  |  |  |
|     |   | b. Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren  | 37 %                  | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |               |        |  |  |  |
| 31. | Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah   | Jumlah siswa RA / Taman Seminari / Pratama Widya Pasraman / Nava Dhammasekha yang ditingkatkan mutunya melalui BOP | 1.026 Orang / Lembaga | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |               |        |  |  |  |
| 32. | Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan  | a. Persentase ustad pendidikan diniyah / muadalah yang lulus sertifikasi   | 87 %                  | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |               |        |  |  |  |

|     |  |  |            |    |    |    |     |   |   |   |   |   |   |                 |        |  |  |
|-----|--|--|------------|----|----|----|-----|---|---|---|---|---|---|-----------------|--------|--|--|
|     |  | b. Persentase tenaga kependidikan pendidikan diniyah / muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi                     | 8 %        | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |                 |        |  |  |
|     |  | c. Persentase kepala pendidikan diniyah / muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi                                  | 10 %       | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |                 |        |  |  |
|     |  | d. Persentase ustad pendidikan diniyah / muadalah yang mendapatkan penguatan KKG / MGMP dan AKG                            | 5 %        | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |                 |        |  |  |
|     |  | e. Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi   | 75 %       | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |                 |        |  |  |
| 33. | Terpenuhi jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal            | a. Persentase guru di sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal                                   | 63,33%     | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |                 |        |  |  |
|     |  | b. Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal                                 | 67,50%     | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |                 |        |  |  |
|     |  | c. Persentase guru pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal                                       | 10 %       | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |                 |        |  |  |
|     |  | d. Persentase tenaga kependidikan pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal                        | 75 %       | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |                 |        |  |  |
| 34. | Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik | a. Persentase Guru Madrasah/sekolah keagamaan yang mengikuti PPG   | 6 %        | 25 | 50 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276,788,675,353 | 94.98% |  |  |
|     |  | b. Persentase guru pendidikan agama yang mengikuti PPG   | 36,80%     | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |                 |        |  |  |
|     |  | c. Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1  | 138 %      | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |                 |        |  |  |
|     |  | d. Persentase Calon Pengawas Madrasah / Sekolah Keagamaan yang menerima beasiswa S2  | 10 %       | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |                 |        |  |  |
| 35. | Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi berdasarkan hasil pemetaan              | Jumlah madrasah / pendidikan diniyah / muadalah / sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi | 45 Lembaga | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |                 |        |  |  |
| 36. | Meningkatnya budaya mutu Pendidikan  | a. Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu   | 80 %       | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |                 |        |  |  |

|     |  |   |             |    |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|---|-------------|----|----|----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |  | b. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu   | 61,67 %     | 25 | 50 | 75 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  | c. Persentase siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional   | 80 %        | 25 | 50 | 75 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  | d. Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional                                    | 7,50 %      | 25 | 50 | 75 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah / sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan | a. Persentase MTs / MA / SMPK / SMTK / SMAK / Pesantren / Pasraman yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran | 60 %        | 25 | 50 | 75 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  | b. Persentase kepala pendidikan diniyah / muadalah yang dibina dalam penetapan budaya belajar yang nyaman dan aman              | 10 %        | 25 | 50 | 75 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  | c. Persentase madrasah / sekolah keagamaan yang ramah anak  | 36,25%      | 25 | 50 | 75 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan              | a. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah / pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan     | 30 Kegiatan | 25 | 50 | 75 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  | b. Jumlah gugus pramuka madrasah / pendidikan keagamaan yang dibina   | 99 Unit     | 25 | 50 | 75 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum  | a. Persentase produk hukum yang diterbitkan   | 85 %        | 25 | 50 | 75 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  | b. Persentase kasus hukum yang terselesaikan  | 50 %        | 25 | 50 | 75 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  | c. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan  | 3 Kegiatan  | 25 | 50 | 75 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Meningkatnya kualitas pengelolaan kerjasama luar negeri  | Persentase rekomendasi izin orang asing   | 94 %        | 25 | 50 | 75 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)        | a. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja  | 100%        | 25 | 50 | 75 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  | b. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti    | 95%         | 25 | 50 | 75 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|     |   |  |           |    |    |    |     |   |   |   |   |   |   |             |        |  |  |
|-----|---|--|-----------|----|----|----|-----|---|---|---|---|---|---|-------------|--------|--|--|
|     |   | c. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan  | 10%       | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |             |        |  |  |
|     |   | d. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)   | 10%       | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |             |        |  |  |
|     |   | e. Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya  | 20%       | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |             |        |  |  |
|     |   | f. Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu  | 95%       | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |             |        |  |  |
|     |   | g. Persentase data ASN yang diupdate   | 90%       | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |             |        |  |  |
|     |   | h. Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses   | 40%       | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |             |        |  |  |
| 42. | Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan | a. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu  | 2 Dokumen | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |             |        |  |  |
|     |   | b. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)                                     | 90%       | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |             |        |  |  |
|     |   | c. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal  | 94%       | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |             |        |  |  |
|     |   | d. Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama  | 25%       | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |             |        |  |  |
| 43. | Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel                                     | a. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya                                       | 41,95%    | 25 | 50 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166,854,030 | 72.16% |  |  |
|     |   | b. Persentase tanah yang bersertifikat   | 28,52%    | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |             |        |  |  |
|     |   | c. Persentase nilai Opname Physic (OP) BMN   | 96%       | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |             |        |  |  |
| 44. | Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi               | a. Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis | 70%       | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |             |        |  |  |
|     |   | b. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi  | 20%       | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |             |        |  |  |
|     |   | c. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti   | 95%       | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |             |        |  |  |
| 45. | Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi                             | a. Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi  | 80%       | 25 | 50 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,042,960 | 82.82% |  |  |

|     |  |  |             |    |    |    |     |   |   |   |   |   |   |               |        |  |
|-----|--|--|-------------|----|----|----|-----|---|---|---|---|---|---|---------------|--------|--|
| 46. | Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran   | a. Persentase output perencanaan yang berbasis data  | 90%         | 25 | 50 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343,647,500   | 94.77% |  |
|     |  | b. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra  | 90%         | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |               |        |  |
|     |  | c. Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti   | 70%         | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |               |        |  |
| 47. | Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran                     | a. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas                                    | 93%         | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |               |        |  |
|     |  | b. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti | 70%         | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |               |        |  |
| 48. | Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor  | Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar   | 70%         | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |               |        |  |
| 49. | Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa | a. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu  | 90%         | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |               |        |  |
|     |  | b. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik   | 60%         | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |               |        |  |
|     |  | c. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen  | 75%         | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |               |        |  |
|     |  | d. Persentase menurunnya lelang gagal  | 70%         | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |               |        |  |
|     |  | e. Persentase menurunnya snggah dan snggah banding   | 60%         | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |               |        |  |
| 50. | Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga                                      | Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan  | 60%         | 25 | 50 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,652,414,000 | 95.07% |  |
| 51. | Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi                            | a. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi                                    | 24 Kegiatan | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |               |        |  |
|     |  | b. Persentase pemberitaan negatif tentang Kemenag yang dicounter   | 90%         | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |               |        |  |
| 52. | Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi  | Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable  | 60 Unit     | 25 | 50 | 75 | 100 |   |   |   |   |   |   |               |        |  |

## **Pengukuran Kinerja**

Salah satu fondasi utama dalam pengelolaan birokrasi adalah pengukuran kinerja sebagai cara untuk menjamin adanya peningkatan layanan publik dan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi outcome. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja aktual (fakta yang ada) dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran ini dilakukan secara berkala, yaitu triwulan dan tahunan. Dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerja Kementerian Agama, dilakukan pengukuran terhadap indikator berdasarkan satuan ukurnya masing-masing, yaitu:

- a. Pengukuran indikator yang dinyatakan dalam satuan indeks yang diambil dari data sekunder.
- b. Indikator yang dinyatakan dalam persentase diukur berdasarkan nilai tertimbang antara output yang dibagi dengan kuantitas subjek yang menjadi sasaran program/kegiatan, misalnya jumlah peserta, jumlah partisipan atau pendaftar pada layanan yang disediakan oleh Kementerian Agama.
- c. Indikator yang dinyatakan dalam satuan jumlah, maka pengukuran dilakukan berdasarkan realisasi jumlah capaian dari kegiatan yang dilaksanakan sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk memudahkan pengelolaan kinerja, data kinerja dikumpulkan dan dirangkum. Pengumpulan dan perangkuman tersebut dengan memperhatikan indikator kinerja yang digunakan, frekuensi pengumpulan data, penanggungjawab, mekanisme perhitungan dan media yang digunakan. Terkait dengan pengumpulan data kinerja pada Kementerian Agama dilakukan konvensional berdasarkan laporan yang diberikan oleh masing-masing unit kerja pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta secara berkala.

## **B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

Pelaksanaan analisis capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 dilakukan melalui hasil pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta.

Tolok ukur keberhasilan capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta tidak seluruhnya dapat dituangkan dalam grafik dan angka - angka. Namun demikian pengukuran tingkat capaian kinerja Kementerian Agama tahun 2020

telah dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 dan realisasi capaian indikator sasaran. Tingkat capaian kinerja masing-masing sasaran kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020.

Pada tahun 2020 ini Program kegiatan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta meliputi 11 program kegiatan. Adapun upaya yang telah dilakukan dan capaian pada Triwulan I s/d IV adalah sebagai berikut:

**1. Sasaran ke - 1: Meningkatnya Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN**

Untuk mengukur tingkat keberhasilan sasaran kegiatan ini, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan 1 (Satu) indikator kinerja, yaitu : 1. Terlayannya Layanan Perkantoran. Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah : 1) Terkelolanya keuangan secara efektif dan efisien; 2) Tersedianya dokumen keuangan; 3) Tersalurkannya belanja lembur pegawai, dan 4) Tersalurkannya belanja tunjangan kinerja pegawai.

Keluaran tersebut dapat dicapai melalui pembinaan dan peningkatan pelayanan administrasi pembiayaan; pembayaran gaji; pelaksanaan pengujian dokumen tagihan; pembinaan perbendaharaan satuan kerja dan penyelenggaraan tata usaha; serta peningkatan mutu penyusunan laporan keuangan, Capaian kinerja pada Triwulan I s/d IV ini 72,16%. Capaian tidak bisa 100% dikarenakan ada sisa anggaran sebesar Rp. 64.365.970. Hal ini disebabkan karena masih sering terjadi revisi anggaran yang mengakibatkan terhambatnya pencairan. Dan faktor lain adalah dengan adanya pandemi covid-19 yang mengakibatkan perubahan pola kerja yang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan optimal.

**2. Sasaran ke - 2: Meningkatnya Pembinaan Administrasi Umum.**

Untuk mengukur tingkat keberhasilan sasaran kegiatan ini, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu : Layanan perkantoran. Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan tersebut adalah:

1) Terciptanya sistem pengadministrasian persuratan; 2) Meningkatnya kualitas petugas administrasi; 3) Tersedianya dokumen bantuan; 4) Tersedianya dokumen-dokumen surat, administrasi bantuan, dan administrasi fasilitas negara. Keluaran dari kegiatan tersebut dapat dicapai melalui pengembangan sistem tata persuratan dan kearsipan yang efektif; peningkatan kualitas jabatan fungsional arsiparis; pengembangan mutu pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan; peningkatan pelayanan; penyusunan rencana pengadaan berbasis kebutuhan; pembenahan manajemen pelayanan, penyimpanan, pendistribusian, dan

pemeliharaan perlengkapan dilingkungan Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, dan pelayanan kerumahtanggaan, dan penertiban pendataan barang - barang inventaris negara. Capaian kinerja indikator ini pada Triwulan I s/d IV sebesar 95,07 %. Capaian tidak mencapai 100% yang menyebabkan ada sisa anggaran sebesar Rp. 396.824.000. Hal ini terjadi dikarenakan situasi pandemi covid-19 sehingga pelaksanaan kegiatan operasional sedikit terhambat terkait koordinasi dengan penyedia, dan faktor lainnya dikarenakan kuantitas dan kualitas SDM terbatas, yakni jumlah pegawai dan kompetensi pegawai yang turut berperan dalam pelaksanaan kegiatan.

### 3. Sasaran ke- 3 Meningkatkan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama

Untuk mengukur tingkat keberhasilan sasaran kegiatan ini, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu: (1) Bantuan operasional SEKBER FKUB Pada tahun 2020 nilai indeks kerukunan umat beragama di Provinsi DKI Jakarta memperoleh capaian nilai sebesar 83 dengan kategori capaian bernilai baik. Capaian nilai tersebut tidak terlepas dari kerjasama berbagai unsur, yaitu unsur pemerintah, unsur keagamaan dan unsur masyarakat. Unsur pemerintah dalam hal ini adalah adanya fasilitasi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta dengan berbagai pembinaan dalam bentuk bantuan pembinaan, bantuan operasional dan bantuan sarana dan prasarana. Sedangkan unsur keagamaan dalam hal ini adalah tokoh- tokoh agama yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Selain itu, untuk meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta melaksanakan kegiatan - kegiatan pengembangan dan pembinaan kerukunan umat beragama dengan melibatkan tokoh-tokoh agama dan masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk: orientasi, penyediaan sarana dan prasarana, pemberian bantuan, dialog, dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas kerukunan hidup umat beragama di Provinsi DKI Jakarta.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), pada tahun 2020 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta melaksanakan Program Kerukunan Umat Beragama, dengan beberapa kegiatan di antaranya:

- Pembinaan kerukunan hidup umat beragama, dengan output : pembinaan aktor-aktor kerukunan umat beragama, pengembangan KUB, dan paket bantuan operasional SEKBER FKUB.
  - Pembinaan pendidikan agama dan keagamaan khonghucu, dengan output : Program pembinaan berupa insentif bagi guru dan penyuluh agama khonghucu dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Capaian kinerja indikator ini pada Triwulan IV sebesar ..... %.
4. Sasaran ke- 4 Meningkatnya Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah Untuk mengukur tingkat keberhasilan sasaran kegiatan ini, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan 13 (Tiga Belas) indikator kinerja, yaitu: 1. Rekonsiliasi dan evaluasi Kelembagaan, 2. Monev Kelembagaan, 3. Peningkatan Layanan KUA Berbasis IT, 4. Jasa Profesi Penghulu, 5. Transport Penghulu, 6. Koordinasi dan Supervisi PNBPN, 7. Piloting Keluarga Sakinah, 8. Supervisi dan Koordinasi Pusaka Sakinah, 9. Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Calon Pengantin, 10. Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Calon Pengantin Mandiri, 11. Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Remaja Usia Sekolah, 12. Rehabilitasi Kantor Urusan Agama (KUA), 13. Sarana dan Prasarana KUA.

Pada tahun 2020, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan KUA agar memenuhi standar pelayanan. Untuk melaksanakan hal tersebut, pada tahun 2020 dilaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan KUA kepada masyarakat. Di samping pelayanan administrasi keagamaan juga terdapat berbagai bentuk dan jenis layanan lain pada Kantor Urusan Agama (KUA), seperti layanan perwakafan, layanan hisab ruk'yat, layanan data dan informasi keagamaan, konsultasi keluarga sakinah, dan lain-lain. KUA juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas aplikasi layanan berbasis IT lainnya, seperti Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), Sistem Informasi Wakaf (SIWAK), Sistem Informasi Masjid (SIMAS).

Pada tahun 2020, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta melakukan bimbingan perkawinan baik pengelolaan keuangan keluarga, bimbingan perkawinan pra nikah, bimbingan perkawinan mandiri dan bimbingan perkawinan pra nikah usia remaja dengan tujuan supaya calon pengantin di Provinsi DKI Jakarta sudah siap dalam berumah tangga. Capaian kinerja indikator ini pada Triwulan I – IV sebesar 96,48 %. Capaian tidak bisa 100% dikarenakan terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 46.984.300. Hal ini disebabkan karena perencanaan kinerja dan

penganggaran masih belum dilakukan secara baik terpusat di Eselon I Pusat, sehingga masih dilakukan penyesuaian (revisi) dokumen DIPA yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran.

**5. Sasaran ke – 5 Meningkatnya Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam**

Untuk mengukur tingkat keberhasilan sasaran kegiatan ini, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar telah menetapkan 4 (empat) indikator kinerja, yaitu : 1. Tunjangan Penyuluh Agama Islam Non PNS, 2. Short Course Dakwah melalui Media Sosial Penyuluh Agama Islam, 3. Rakor dan Pembinaan Penyuluh Agama Islam, 4. Pendataan dan Verifikasi Lembaga Seni dan Siaran Keagamaan Islam.

Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah : 1) Terbayarkannya tunjangan penyuluh agama islam non PNS; 2) Meningkatnya kualitas penyuluh agama islam non PNS; 3) Meningkatnya kemampuan dakwah para penyuluh agama islam; 4) Terbinanya penyuluh agama islam sehingga menjadi penyuluh yang berkualitas dan bedaya saing tinggi, dan 5) Terperolehnya data yang akurat tentang lembaga seni dan siaran agama islam. Keluaran tersebut dicapai melalui kegiatan pendataan inventarisasi kepustakaan islam. Capaian kinerja indikator ini pada Triwulan I - IV sebesar 99,18 %. Capaian tidak bisa 100% dikarenakan terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 14.391.500. Hal ini disebabkan karena keterlambatan juknis sebagai acuan kegiatan monitoring pendampingan sertifikasi tanah wakaf, akreditasi lembaga zakat dan efisiensi perjalanan dinas MTQ Tk. Nasional dari total pagu yang tersedia.

**6. Sasaran ke – 6 Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam**

Untuk mengukur tingkat keberhasilan sasaran kegiatan ini, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan 3 (Tiga) indikator kinerja,yaitu: 1. Terwujudnya dokumen standar nasional pendidikan; 2. Terlaksananya pengembangan kapasitas diri tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; 3. Terwujudnya dukungan operasional penyelenggaraan pendidikan. Capaian kinerja indikator ini pada Triwulan I – IV sebesar 96 %. Capaian tidak dapat 100%, dikarenakan adanya tambahan dana hibah dari Pemda DKI Jakarta dan pengurangan akibat refocusing covid-19, dan faktor lain dikarenakan perbedaan realisasi antara penyerapan anggaran dengan riil fisik disebabkan terjadi efisiensi anggaran dan pengembalian ke kas daerah.

**7. Sasaran ke - 7 Meningkatnya Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen**

Untuk mengukur tingkat keberhasilan sasaran kegiatan ini, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan 4 (empat) indikator kinerja, yaitu: 1. Program KIP Siswa SMTK; 2. Pemberian BOS Tingkat SMTK; 3. Tunjangan Profesi Guru Non PNS; 4. Insentif Guru Non PNS. Capaian kinerja indikator ini pada Triwulan I - IV sebesar 97,64 %. Capaian tidak dapat 100%, dikarenakan pandemi covid-19 yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan sehingga mempengaruhi penyerapan anggaran.

**8. Sasaran ke – 8 Meningkatnya Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik**

Untuk mengukur tingkat keberhasilan sasaran kegiatan ini, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu: 1. Honor Pramubakti; dan 2. Pemberian bantuan KKG Pendidikan Agama Katolik. Keluaran (outputs) yang dari kegiatan ini adalah : 1) Meningkatnya dukungan manajemen administrasi urusan agama Katolik; 2) Meningkatnya fungsi dan layanan bimbingan lembaga keagamaan Katolik; 3) Meningkatnya tugas bimbingan dan penyuluhan agama Katolik; 4) Terlaksananya pemberdayaan umat. Capaian kinerja indikator ini pada Triwulan I – IV sebesar 93 %. Capaian tidak dapat 100%, dikarenakan masih kurangnya SDM yang berkualitas dalam pelaksanaan kegiatan, masih adanya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh pembimas katolik yang dianggarkan tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena pengaruh pandemi covid-19, dan masih ditemukannya data guru-guru non PNS penerima TPG yang kurang valid (masa pensiun) sehingga kelebihan anggaran.

**9. Sasaran ke – 9 Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu**

Untuk mengukur tingkat keberhasilan sasaran kegiatan ini, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu: Terlayannya Layanan Perkantoran. Capaian kinerja indikator ini pada Triwulan I – IV sebesar 95,86 %. Pencapaian tidak bisa 100% dikarenakan masih kurangnya SDM yang berkualitas dalam pelaksanaan kegiatan, dan faktor lainnya disebabkan karena masih adanya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh pembimas hindu yang tidak dianggarkan secara maksimal sehingga terkesan kegiatan tersebut berjalan seanya tanpa memikirkan kualitas yang dihasilkan.

**10. Sasaran ke – 10 Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Budha**

Untuk mengukur tingkat keberhasilan sasaran kegiatan ini, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu: 1. Terlayannya Layanan Perkantoran Capaian kinerja indikator ini pada Triwulan I – IV sebesar 99,54 %. Capaian tidak dapat 100%, dikarenakan pandemi covid-19 yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan sehingga mempengaruhi penyerapan anggaran.

#### 11. Sasaran ke – 11 Meningkatkan Pelayanan Haji Dalam Negeri

Untuk mengukur tingkat keberhasilan sasaran kegiatan ini, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan 5 (lima) indikator kinerja, yaitu: 1. Sosialisasi / Orientasi Penyelesaian Dokumen dan Perlengkapan Haji; 2. Penyelesaian Dokumen/Perlengkapan Jamaah Haji di tingkat Kabupaten/Kota; 3. Pelayanan Pemberangkatan/Pemulangan Jamaah; 4. Sosialisasi Kebijakan Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler; 5. Pengelolaan Pelayanan Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler. Keluaran yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah: Adanya dukungan manajemen administrasi pelayanan; 1) Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran calon jamaah haji; 2) Meningkatnya kualitas pelayanan dokumen; 3) Meningkatnya kualitas pelayanan akomodasi dan konsumsi; 4) Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi. Hasil dari kegiatan tersebut dapat dicapai melalui peningkatan dukungan administrasi pelayanan; optimalisasi pelayanan pendaftaran, dokumen perjalanan, transportasi, akomodasi, konsumsi, dan kesehatan; peningkatan pelayanan keamanan dan perlindungan; penyediaan dan peningkatan kualitas petugas; penguatan koordinasi kelembagaan; peningkatan sarana dan prasarana, serta pengembangan mutu pelayanan. Capaian kinerja indikator ini pada Triwulan I – IV sebesar 76,88 %. Capaian tidak dapat 100%, dikarenakan pandemi covid-19 yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan sehingga mempengaruhi penyerapan anggaran.

### C. Realisasi Anggaran

Untuk memenuhi capaian keberhasilan sasaran kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi, perlu adanya dukungan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Total anggaran yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 140.237.695.000,- namun dalam pengelolaan anggaran selama tahun 2020, terjadi beberapa kali revisi atau perubahan alokasi anggaran tersebut. Total anggaran sesudah revisi selama tahun 2020

pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar adalah sebesar Rp.376.924.667.000. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 per program adalah sebagai berikut :

**Tabel 3**  
**Tabel Capaian IKSK**  
**Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta**  
**Tahun 2020**

| NO                        | KODE SATKER | SATKER         | PAGU (Rp)       | REALISASI (Rp)  | SISA           | %      |
|---------------------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------|
| <b>Kanwil Kemenag DKI</b> |             |                |                 |                 |                |        |
| 1                         | 416295      | SETJEN         | 18,360,461,000  | 17,859,004,635  | 501,456,365    | 97.27% |
| 2                         | 416292      | BIMAS ISLAM    | 7,423,441,000   | 7,263,034,293   | 160,406,707    | 97.84% |
| 3                         | 416296      | DITJEN PENDIS  | 325,702,978,000 | 311,733,542,731 | 13,969,435,269 | 95.71% |
| 4                         | 416293      | BIMAS KATHOLIK | 5,993,230,000   | 5,610,612,091   | 382,617,909    | 93.62% |
| 5                         | 416294      | BIMAS HINDU    | 1,928,547,000   | 1,876,764,007   | 51,782,993     | 97.31% |
| 6                         | 416297      | BIMAS KRISTEN  | 8,400,950,000   | 8,203,004,425   | 197,945,575    | 97.64% |
| 7                         | 416298      | DITJEN PHU     | 6,145,490,000   | 5,314,944,736   | 830,545,264    | 86.49% |
| 8                         | 416299      | BIMAS BUDDHA   | 2,969,570,000   | 2,955,804,650   | 13,765,350     | 99.54% |

Jumlah anggaran yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 mengalami Penurunan. Pada tahun 2019 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.1.788.297.467.000,- sedangkan pada tahun 2020 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 140.237.695.000,- atau mengalami Penurunan sebesar Rp. 1.648.059.772.000,- Tetapi pada tahun anggaran berjalan terjadi revisi DIPA Sekretariat Jenderal, Bimas Islam, Pendidikan Islam, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik, dan Budha. Revisi ini ada yang bersifat kenaikan anggaran dan ada yang berupa penurunan anggaran, sehingga total DIPA pada akhir tahun anggaran sebesar Rp. 376.924.667.000,- dan total realisasi sebesar Rp. 360.816.711.568,- Persentase serapan anggaran sebesar 95,73%.

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Tahunan Kementerian Agama tahun 2020 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun 2020 dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Tahunan Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 702 Tahun 2019 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pada Kementerian Agama.

Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. DKI Jakarta pada Tahun 2020 dengan 11 program yang ada secara keseluruhan mencapai rata-rata capaian kinerja sebesar 95,68%. Salah satu yang mendukung keberhasilan capaian kinerja Kanwil Kementerian Agama Prov. DKI Jakarta adalah keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan pada Program Pembimbing Masyarakat Buddha (99,54%) Program Bidang Penerangan Agama Islam dan Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf (99,18%), sedangkan Program Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (76,88%) menyumbang turunnya capaian kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Apabila dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja tahun 2019, ada beberapa program yang berusaha untuk meningkatkan capaian kinerjanya antara lain Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, Program Pendidikan Islam, Program Bimbingan Masyarakat Kristen, Program Bimbingan Masyarakat Katolik, Program Bimbingan Masyarakat Hindu, dan Program Bimbingan Masyarakat Buddha.

Sedangkan dari sisi realisasi capaian anggaran yaitu sebesar 95,73% lebih disebabkan oleh efisiensi penggunaan anggaran masing-masing program dan musibah pandemic covid-19. Pencapaian tingkat realisasi 100% pada anggaran akan sulit dicapai dikarenakan fluktuatif harga-harga dipasar yang selalu berubah setiap bulannya sedangkan penyusunan anggaran dilakukan awal tahun anggaran yang belaku selama satu tahun lamanya. Akan tetapi fokus penataan penyusunan anggaran harus selalu dilakukan dimana penetapan harga berdasarkan harga satuan yang dikeluarkan Pemerintah.

Secara umum sasaran kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. DKI Jakarta Tahun 2020 telah dapat dilaksanakan dengan sangat baik, jika diperhatikan dari kondisi pembukaan blokir anggaran yang memasuki semester kedua dibandingkan dengan pelaksanaan tahun sebelumnya.

Secara umum capaian sasaran strategis Kanwil Kementerian Agama Prov. DKI Jakarta sudah baik dan sangat memuaskan, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut perlu dipertahankan atau ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

Demikian Laporan Kinerja Tahunan Kementerian Agama tahun 2020 ini disusun, semoga bermanfaat bagi semua pihak.

Jakarta, 4 Februari 2021

Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Agama Prov. DKI Jakarta



Saiful Mujab, MA  
196808201995031002



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **Saiful Mujab**

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Nizar**

Jabatan : Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 September 2020

Pihak Kedua



Pihak Pertama



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA**

| No. | Sasaran Kegiatan   | IKSK  | TARGET |                   |
|-----|--|---|--------|-------------------|
| 1.  | Meningkatnya kualitas penyuluhan agama   | a. Nilai kinerja penyuluh agama   | 85.83  | Nilai             |
|     |  | b. Persentase penyuluh agama yang dibina  | 77.48  | %                 |
|     |  | c. Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi  | 1,885  | Orang             |
|     |  | d. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan   | 32,826 | Kelompok          |
| 2.  | Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama   | a. Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti  | 100    | %                 |
|     |  | b. Jumlah aktor kerukunan yang dibina   | 8,863  | Orang             |
|     |  | c. Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina  | 72     | Lokasi            |
| 3.  | Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa | a. Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi                             | 191    | Lembaga           |
|     |  | b. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan   | 82     | Kegiatan          |
| 4.  | Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)  | Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP   | 96     | %                 |
| 5.  | Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama  | a. Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama | 29.17  | %                 |
|     |  | b. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan   | 193    | Lokasi / Kegiatan |
| 6.  | Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama   | Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat   | 94.17  | %                 |
| 7.  | Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran   | a. Persentase rumah ibadah yang ramah   | 40.73  | %                 |
|     |  | b. Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina  | 14.50  | %                 |
|     |  | c. Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya   | 70     | Orang             |
| 8.  | Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik  | Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media masa dan ruang publik  | 92     | Lokasi            |
| 9.  | Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama   | a. Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama                                 | 50     | %                 |

| No. | Sasaran Kegiatan   | IKSK  | TARGET       |
|-----|--|---|--------------|
|     |  | b. Persentase siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama                  | 52.5 %       |
|     |  | c. Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama                       | 35.33 %      |
|     |  | d. Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama  | 14.50 %      |
|     |  | e. Persentase guru pendidikan agama di sekolah keagamaan dan sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama               | 55.33 %      |
|     |  | f. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama   | 70.67 %      |
|     |  | g. Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama                                     | 9.28 %       |
|     |  | h. Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama   | 27.5 %       |
|     |  | i. Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama                                 | 31.25 %      |
|     |  | j. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di Madrasah yang bermuatan moderasi beragama                                   | 140 Kegiatan |
|     |  | k. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama                          | 51 Kegiatan  |
| 10  | Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam                | a. Persentase pesantren yang berwawasan moderat   | 80 %         |
|     |  | b. Persentase peningkatan peserta didik pada pendidikan diniyah takmiliyah dan pendidikan Al-Qur'an yang berwawasan moderat | 3 %          |
| 11  | Menguatnya dialog lintas agama dan budaya  | Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan  | 707 Kegiatan |
| 12. | Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat | Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)     | 11 Unit      |

| No. | Sasaran Kegiatan   | IKSK   | TARGET           |
|-----|--|--|------------------|
| 13  | Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama  | Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh Pesparawi MTQ, STQ, Ustawa dll)            | 44 Kegiatan      |
| 14  | Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama  | a. Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi rumah ibadah yang dibina  | 19 Kegiatan      |
|     |  | b. Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina  | 56 Orang         |
| 15  | Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan   | a. Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan   | 1256 Unit        |
|     |  | b. Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan  | 57,090 Eksemplar |
|     |  | c. Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi  | 20.6 %           |
|     |  | d. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan  | 58 Kegiatan      |
|     |  | e. Jumlah masjid/ musala yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat   | 5 Lokasi         |
|     |  | f. Jumlah SDM Ahli Falakiyah yang dibina   | 20 Orang         |
| 16. | Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk (Islam)  | a. Jumlah KUA yang direvitalisasi  | 4 Lokasi         |
|     |  | b. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana   | 10 Lokasi        |
|     |  | c. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah   | 50 Orang         |
|     |  | d. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah                   | 50 Orang         |
| 17  | Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga   | Jumlah keluarga yang menerima bimbingan dan layanan pusaka sakinah/ Kristiani/ Bahagia/ Sukinah/ Hitta sukhaya | 4,715 Pasang     |
| 18  | Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus | Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi                                     | 50 %             |
| 19  | Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji  | a. Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan   | 11.16 %          |
|     |  | b. Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan                              | 0.5 %            |
| 20  | Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji   | Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu   | 85 %             |
| 21  | Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji  | Prosentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji   | 95 %             |
| 22  | Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu  | Persentase keberlanjutan layanan ( <i>Continuity service</i> )   | 80 %             |
| 23  | Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat   | a. Persentase amil yang dibina   | 1.82 %           |
|     |  | b. Persentase lembaga zakat yang dibina  | 6.38 %           |
| 24  | Meningkatnya pengelolaan aset wakaf  | a. Persentase lembaga wakaf yang dibina  | 9.82 %           |

| No. | Sasaran Kegiatan  | IKSK   | TARGET     |
|-----|---|--|------------|
|     |   | b. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan  | 20 %       |
|     |   | c. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat   | 6.67 %     |
| 25  | Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif            | a. Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum                                | 75 %       |
|     |   | b. Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum             | 10 %       |
|     |   | c. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum                       | 46.67 %    |
| 26  | Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan  | a. Persentase guru di madrasah/ sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan        | 47.78 %    |
|     |   | b. Persentase ustadz di pendidikan diniyah/ muadalah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan     | 47.78 %    |
|     |   | c. Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan                      | 47.78 %    |
|     |   | d. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/Sekolah Keagamaan                            | 3 Kegiatan |
|     |   | e. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa   | 100 Siswa  |
|     |   | f. Persentase siswa yang mengikuti asesmen kompetensi di madrasah/ sekolah keagamaan                               | 55 %       |
| 27  | Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran | a. Persentase madrasah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran  | 6 %        |
|     |   | b. Persentase sekolah Keagamaan yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran   | 21.67 %    |
|     |   | c. Persentase mata pelajaran di Madrasah yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran          | 6 %        |
|     |   | d. Persentase mata pelajaran di Sekolah Keagamaan yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran | 20.17 %    |
| 28  | Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Pendidikan                               | a. Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana         | 88.00 %    |

| No. | Sasaran Kegiatan  | IKSK  | TARGET              |
|-----|---|---|---------------------|
|     |   | b. Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana                            | 59.75 %             |
|     |   | c. Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana                    | 61.75 %             |
|     |   | d. Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana                     | 84.75 %             |
|     |   | f. Persentase Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana                | 25 %                |
| 29  | Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat | a. Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah  | 188,981 Orang       |
|     |   | b. Jumlah siswa penerima BOS pada Sekolah Keagamaan/PDF Muadalah  | 22,939 Orang        |
|     |   | c. Persentase siswa penerima PIP pada madrasah/ sekolah keagamaan   | 84 %                |
|     |   | d. Persentase siswa penerima PIP pada Pendidikan Keagamaan/PDF Muadalah                                     | 20 %                |
|     |   | e. Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional   | 4 %                 |
| 30  | Meningkatnya kualitas penanganan ATS  | a. Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi   | 0.10 %              |
|     |   | b. Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren                                 | 37 %                |
| 31  | Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah   | Jumlah siswa RA/ Taman Seminari/Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP | 1,026 Orang/Lembaga |
| 32  | Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan  | a. Persentase ustad pendidikan diniyah/muadalah yang lulus sertifikasi                                      | 87 %                |
|     |   | b. Persentase tenaga kependidikan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi        | 8 %                 |
|     |   | c. Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi                     | 10 %                |
|     |   | d. Persentase ustad pendidikan diniyah/ muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG                | 5 %                 |
|     |   | e. Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi                                  | 75 %                |

| No. | Sasaran Kegiatan  | IKSK   | TARGET      |
|-----|---|--|-------------|
| 33  | Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal                          | a. Persentase guru di sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal                                   | 63.33 %     |
|     |   | b. Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal                                 | 67.50 %     |
|     |   | c. Persentase guru pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal                                       | 10 %        |
|     |   | d. Persentase tenaga kependidikan pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal                        | 75 %        |
| 34  | Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik                  | a. Persentase Guru Madrasah/sekolah keagamaan yang mengikuti PPG   | 6 %         |
|     |   | b. Persentase guru pendidikan agama yang mengikuti PPG   | 36.80 %     |
|     |   | c. Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1  | 138 %       |
|     |   | d. Persentase Calon Pengawas Madrasah/Sekolah Keagamaan yang menerima beasiswa S2  | 10 %        |
| 35  | Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi berdasarkan hasil pemetaan                               | Jumlah madrasah/ pendidikan diniyah/ muadalah/sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi     | 45 Lembaga  |
| 36  | Meningkatnya budaya mutu Pendidikan   | a. Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu   | 80 %        |
|     |   | b. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu  | 61.67 %     |
|     |   | c. Persentase siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional  | 80 %        |
|     |   | d. Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional                               | 7.50 %      |
| 37  | Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/ sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan | a. Persentase MTs/MA/SMPTK/ SMTK/SMAK/ Pesantren/ Pasraman yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran    | 60 %        |
|     |   | b. Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman           | 10 %        |
|     |   | c. Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang ramah anak   | 36.25 %     |
| 38  | Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan            | a. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah/ pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan | 30 Kegiatan |

| No. | Sasaran Kegiatan  | IKSK  | TARGET     |
|-----|---|---|------------|
|     |   | b. Jumlah gugus pramuka madrasah/ pendidikan keagamaan yang dibina  | 99 Unit    |
| 39  | Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum   | a. Persentase produk hukum yang diterbitkan   | 85 %       |
|     |   | b. Persentase kasus hukum yang terselesaikan  | 50 %       |
|     |   | c. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan  | 3 Kegiatan |
| 40  | Meningkatnya kualitas pengelolaan kerjasama luar negeri   | Persentase rekomendasi izin orang asing   | 94 %       |
| 41  | Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai) | a. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja  | 100 %      |
|     |   | b. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditandakanjuti | 95 %       |
|     |   | c. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan   | 10 %       |
|     |   | d. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)                                    | 10 %       |
|     |   | e. Persentase ASN yang memenuhi syarat <i>leveling</i> kompetensi jabatannya  | 20 %       |
|     |   | f. Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu   | 95 %       |
|     |   | g. Persentase data ASN yang diupdate  | 90 %       |
|     |   | h. Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses  | 40 %       |
| 42  | Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan                   | a. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu                                   | 2 Dokumen  |
|     |   | b. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)                              | 90 %       |
|     |   | c. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal   | 94 %       |
|     |   | d. Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama   | 25 %       |
| 43  | Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel   | a. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya                                | 41.95 %    |
|     |   | b. Persentase tanah yang bersertifikat  | 28.52 %    |
|     |   | c. Persentase nilai Opname Physic (OP)BMN   | 96 %       |

| No. | Sasaran Kegiatan   | IKSK   | TARGET      |
|-----|--|--|-------------|
| 44  | Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi                          | a. Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis | 70 %        |
|     |  | b. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi  | 20 %        |
|     |  | c. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti   | 95 %        |
| 45  | Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi  | a. Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi  | 80 %        |
| 46  | Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran   | a. Persentase output perencanaan yang berbasis data  | 90 %        |
|     |  | b. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra  | 90 %        |
|     |  | c. Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti   | 70 %        |
| 47  | Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran                     | a. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas  | 93 %        |
|     |  | b. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti                 | 70 %        |
| 48  | Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor  | Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar   | 70 %        |
| 49  | Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa | a. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu  | 90 %        |
|     |  | b. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik   | 60 %        |
|     |  | c. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen  | 75 %        |
|     |  | d. Persentase menurunnya lelang gagal  | 70 %        |
|     |  | e. Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding   | 60 %        |
| 50  | Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga                                      | Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan  | 60 %        |
| 51  | Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi                            | a. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi  | 24 Kegiatan |
|     |  | b. Persentase pemberitaan negatif tentang Kemenag yang dicounter   | 90 %        |
| 52  | Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi  | Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable  | 60 Unit     |

| No                        | Program   | Anggaran  |                        |
|---------------------------|---|-----------|------------------------|
| 1                         | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama | Rp        | 19,809,654,000         |
| 2                         | Kerukunan Umat Beragama   | Rp        | 339,112,000            |
| 3                         | Bimbingan Masyarakat Islam  | Rp        | 9,065,095,000          |
| 4                         | Pendidikan Islam  | Rp        | 83,761,887,000         |
| 5                         | Bimbingan Masyarakat Kristen  | Rp        | 9,593,262,000          |
| 6                         | Bimbingan Masyarakat Katolik  | Rp        | 6,140,230,000          |
| 7                         | Bimbingan Masyarakat Hindu  | Rp        | 1,928,547,000          |
| 8                         | Bimbingan Masyarakat Buddha   | Rp        | 3,082,793,000          |
| 9                         | Penyelenggaraan Haji dan Umrah  | Rp        | 6,517,115,000          |
| <b>JUMLAH KESELURUHAN</b> |   | <b>Rp</b> | <b>140,237,695,000</b> |

Jakarta, 1 September 2020

Plt. Sekretaris Jenderal



Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta



# STRUKTUR ORGANISASI

KANWIL KEMENAG PROV. DKI JAKARTA  
BERDASARKAN PMA 13 TAHUN 2012

**KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA**  
H. SAIFUL MUJAB, MA  
NIP. 196808201995031002  
(Gol IV/b)

Kw.09.1

**KEPALA BAGIAN TATA USAHA**  
Drs. H. SADIRIN, MA  
NIP. 196203211991031001  
(Gol IV/b)

